I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan, hal tersebut dijabarkan dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun (2012), Peraturan.bkp.go.id tentang Pangan.

Tolak ukur keberharsilan ekonomi masyarakat dilihat dari angka kebutuhan hidup, peran pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan sangat dibutuhkan, tetapi ada beberapa permasalahan tersendiri dalam sebuah kebijakan atau program yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini berkaitan juga dengan distribusi pangan dalam sebuah daerah, daya beli masyarakat dan daya konsumsi masyarakat.

Badan Ketahanan Pangan Nasional merupakan badan yang dibuat atau diusulkan oleh presiden langsung dan sudah didirikan pada tahun 2020 dengan dasar pendirian Badan Pangan Nasional yaitu terdapat pada Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan.bkp.go.id, selanjutnya diterangkan mengenai arah kebijakan dan kinerja diatur dalam Perpres No 66 Tahun 2021, Peraturan.bkp.go.id tentang Badan Pangan Nasional.

Berdasarkan landasan hukum atau dasar hukum yang mengatur tentang ketahanan pangan yang tertera dalam Undang-Undang No 18 tahun (2012), Peraturan.bkp.go.id tentang pangan, tertera pada pasal 46 ayat (1) pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan. Dalam pasal 46 ayat (2) menjelaskan dalam mewujudkan keterjangkauan pangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah melaksanakan kebijakan pemerintah dibidang, a. distribusi, b. pemasaran, c. perdagangan, d. stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok dan e. bantuan pangan.

Undang-Undang No 7 tahun (2014), Peraturan.bkp.go.id tentang perdagangan tertera pada pasal 5 ayat (3) mengenai kebijakan perdagangan dalam negeri yang mengatur ketersediaan dan keterjangkauan barang kebutuhan pokok masyarakat, dengan melakukan pengembangan dan penguatan usaha di bidang perdagangan dalam negeri, termasuk koperasi, pasar atau usaha mikro kecil dan menengah, serta perlindungan konsumen dan pada pasal (7) ayat (1) menjelaskan distribusi barang dibagi menjadi 2 bagian yaitu distribusi barang secara tidak langsung dan langsung dengan diperjelas kembali pada ayat (2) distribusi secara tidak langsung menggunakan rantai distribusi yang bersifat umum anatara lain distributor dan jaringannya, agen dan jaringannya atau warabala, pada ayat (3) menjelaskan distribusi secara langsung dengan menggunakan khusus melalui sistem penjualan langsung secara *single* level atau multilevel.

Peraturan, Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015, Peraturan.bkp.go.id Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi, Pada pasal (59) mengenai distribusi pangan ayat (2) dalam berisikan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: pengembangan sistem Distribusi Pangan yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara efektif dan efisien, dan pengelolaan sistem Distribusi Pangan yang dapat meningkatkan keterjangkauan Pangan.

Masalah pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan. danya penduduk miskin, daerah rawan pangan, produksi pangan dihasilkan tidak merata antar wilayah dan sepanjang waktu, potensi SDA yang berbeda di masing-masing daerah akan berpengaruh terhadap distribusi dan pasokan bahan pangan. Oleh sebab itu, peranan distribusi pangan yang terjangkau dan merata sepanjang waktu akan berpengaruh terhadap peningkatan akses pangan bagi setiap rumah tangga di dalam memenuhi kecukupan pangannya (Sukartiningsih,dkk 2014).

Kondisi faktual belakangan ini memperlihatkan bahwa hambatan-hambatan distribusi pangan masih menjadi kendala dalam mewujudkan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Hambatan distribusi pangan disinyalir dikarenakan beberapa faktor seperti :

(1) Rantai distribusi pangan pokok yang tidak efisien;
(2) Ketidakcukupan pasokan pangan di suatu wilayah;
(3) Waktu panen bervariasi; dan
(4) Prasarana dan sarana transportasi yang kurang mendukung dalam kelancaran distribusi pangan (Kementerian Pertanian, 2020)

Pada pasal (6) Perpres Nomor 83, Tahun 2017, Peraturan.bkp.go.id mengenai keterjangkaungan pangan yang berfungsi sebagai a. efisiensi pemasaran pangan, b. penguatan sistem logistik pangan, c. stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok dan pangan lainnya, d. pemberdayaan masyarakat di bidang pangan dan gizi, e. penanganan kerawanan pangan dan gizi dan f. penyediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi. Kondisi tersebut berdasarkan point c pasal (6) Perpres Nomor 83 Tahun 2017 terjadinya fluktuasi harga pangan yang berakibat ketidakpastian harga pangan baik di tingkat produsen maupun pada konsumen, dalam ekskalasi lebih luas akan mempengaruhi dalam pengendalian inflasi pangan.

Kegiatan yang dapat direncanakan oleh pemerintah pusat pada tahun 2016, Kementerian Pertanian, Badan Ketahanan Pangan melakukan upaya pengendalian pasokan dan harga pangan dengan melakukan intervensi kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui Toko Tani Indonesia (TTI). (Kementerian Pertanian, 2020). Kegiatan pada Pasar Mitra Tani (PMT)/Toko Tani Indonesia Centre (TTIC) berfungsi sebagai distribution centre, dimana PMT/TTIC melakukan aktivitas penyaluran pangan langsung kepada konsumen ataupun melalui Toko Mitra Tani (TMT)/Toko Tani Indonesia (TTI). Sampai saat ini telah didirikan 36 PMT/TTIC di 34 provinsi dengan rincian 34 PMT/TTIC di 34 provinsi, dan 2 PMT/TTIC di Pusat yang berlokasi di Pasar Minggu- Jakarta dan Bogor (Kementerian Pertanian, 2020).

Kegiatan dalam menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Bekasi, Dinas Ketahanan Pangan bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan untuk mengetahui data terkini mengenai hasil produksi tanaman pangan serta pengendalian stabiltas harga dan pasokan yang ada di Kabupaten Bekasi, peran lain dari Dinas Ketahanan Pangan menurut peraturan Bupati Bekasi no 60 (2016), Peraturan.bkp.go.id yaitu Perumusan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, koordinasi penyediaan infrastruktur, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.

Tabel 1.1 Data Time Series Jumlah Produksi Tanaman Pangan di Provinsi Jawa Barat

Wilayah Jawa Barat	Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kabupaten / Kota (Kuintal)																		
	Bawang Putih					Cabe Besar					Cabai					Bawang Merah			
	2019	2018	2017	2016	2015	2019	2018	2017	2016	2015	2019	2018	2017	2016	2015	2019	2018	2017	2016	2015
Provinsi Jawa Barat	-	13259	13946	15478	10078	2636100	2740374	2743112	2421130	2408639	-	4054526	4092207	1015422	1126344	1733413	1677700	1668652	1415043	1291477
Bogor	-	92	-	0	0	36699	38097	36862	29931	23521	-	60377	50691	10709	8826	0	-	450	0	0
Sukabumi	-	40	-	0	0	216741	179321	119556	149081	137774	-	274469	208106	74652	131350	3550	9280	11690	9078	3958
Cianjur	-	475	-	0	0	298742	365501	443943	617037	590199	-	588600	624425	146447	197135	2435	2998	1330	400	1300
Bandung	-	11573	13946	12555	10078	434261	496546	405328	172243	249706	-	685457	580730	93003	133108	621001	645858	468300	306471	372590
Garut	-	521	-	682	0	925690	911354	1023851	807428	757208	-	1302658	1536653	337202	318587	321047	284586	353849	301461	220385
Tasikmalaya	-	-	-	0	0	151832	168977	200268	168249	180194	-	206866	240157	34463	58581	1005	896	264	655	150
Ciamis	-	-	-	0	0	47986	59809	36004	41987	53618	-	79669	44754	11898	10562	877	600	0	0	0
Kuningan	-	-	-	0	0	7155	6472	13085	10176	3667	-	34399	41245	13403	27853	44442	27170	35828	31090	32353
Cirebon	-	-	-	0	0	55647	64987	55499	60489	41532	-	65127	57165	1200	163	334715	353072	383740	403265	317818
Majalengka	-	558	-	2241	0	124314	130489	124517	119319	97500	-	211566	199597	79667	34380	379731	319806	377053	323292	324082
Sumedang	-	-	-	0	0	47356	42033	51174	50240	48317	-	69611	85906	41152	32843	3017	2295	3280	1742	1783
Indramayu	-	-	-	0	0	25237	26272	23912	19898	55983	-	30732	34878	9033	7560	14646	25531	28966	35375	16065
Subang	-	-	-	0	0	49963	51854	74525	60106	59062	-	85657	111507	29568	21423	2799	2850	2575	1160	0
Purwakarta	-	-	-	0	0	38755	44131	46822	43295	54699	-	94624	100664	50295	71163	0	-	0	0	0
Karawang	-	-	-	0	0	285	197	30	776	1377	-	2063	866	3225	5680	485	330	2	0	0
Bekasi	-	-	-	0	0	637	629	447	1092	1976	-	1567	1453	132	371	418	-	50	0	120
Bandung Barat	-	-	-	0	0	161903	140378	77092	60668	41319	-	237127	150951	69787	46077	800	910	745	1054	873
Pangandaran	-	-	-	0	0	3328	937	818	292	1072	-	1718	2627	1064	2204	115	10	80	0	0
Kota Bogor	-	-	-	0	0	1440	1930	3250	3510	3280	-	7440	10180	4500	16050	0	-	0	0	0
Kota Sukabumi	-	-	-	0	0	665	980	2005	830	1595	-	1245	2005	0	0	50	500	0	0	0
Kota Bandung	-	-	-	0	0	0	0	12	10	8	-	-	58	108	206	0	-	0	0	0
Kota Cirebon	-	-	-	0	0	321	1077	0	3	0	-	1077	0	0	0	2053	1008	450	0	0
Kota Bekasi	-	-	-	0	0	0	90	173	144	367	-	133	413	465	189	0	-	0	0	0
Kota Depok	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	45	0	0	0	0	-	0	0	0
Kota Cimahi	-	-	-	0	0	350	140	30	410	582	-	140	795	638	714	0	-	0	0	0
Kota Tasikmalaya	-	-	-	0	0	4513	5340	3199	3629	3653	-	5971	3911	878	355	0	-	0	0	0
Kota Banjar	-	-	-	0	0	2280	2833	710	287	430	-	6188	2470	1033	964	227	-	0	0	0

Sumber : Data Time Series 3 Tahun terakhir BPS, Jabar

Tabel 1.2 Lanjutan Tabel 1.1

Wilayah Jawa Barat	Produksi Beras Menurut Kabupaten/Kota (Ton)		Produksi Padi Menurut Kabupaten/Kota (Ton)			Produktivitas Tanaman Kedelai dan Jagung (Ton/Hekta)
	2021	2020	2021	2020	2018	2015
Provinsi Jawa Barat	5374153.33	5180201.84	9354368.84	9016772.58	9539330	0,086111111
Bogor	173072.69	171763.14	301254.10	298974.65	-	00.00
Sukabumi	296273.13	299582.16	515699.54	521459.25	-	01.41
Cianjur	349283.46	357913.67	607970.44	622992.32	-	01.23
Bandung	171320.08	159228.31	298203.50	277156.28	-	0,093055556
Garut	261610.54	244116.16	455365.04	424913.90	-	0,086111111
Tasikmalaya	285978.50	255287.06	497780.42	444358.24	-	01.59
Ciamis	190545.41	162465.77	331667.49	282791.46	-	0,097222222
Kuningan	161790.39	159321.16	281615.91	277317.90	-	02.00
Cirebon	272723.01	285576.14	474707.62	497080.10	-	01.36
Majalengka	308510.28	325363.32	536999.75	566334.48	-	02.37
Sumedang	152462.23	176475.99	265379.11	307178	-	0,097222222
Indramayu	785182.60	783232.64	1366705.98	1363311.87	-	0,096527778
Subang	568511.67	557708.57	989563.83	970759.74	-	01.59
Purwakarta	98621.20	91896.76	171662.18	159957.49	-	0,090972222
Karawang	717953.46	624991.50	1249685.50	1087873.90	-	02.05
Bekasi	345291.13	289611.04	601021.28	504103.31	-	01.00
Bandung Barat	88156.26	94587.16	153446.70	164640.49	-	01.55
Pangandaran	81670.97	89038.63	142158.29	154982.57	-	0,090277778
Kota Bogor	96.55.00	87.48.00	168.08.00	152.26.00	-	00.00
Kota Sukabumi	8723.47.00	8349.12.00	15184.27	14532.67	-	00.00
Kota Bandung	4178.19.00	3906.11.00	7272.66	6799.08.00	-	00.00
Kota Cirebon	685.41.00	592.46.00	1193.01.00	1031.24.00	-	00.00
Kota Bekasi	1464.04.00	1564.41.00	2548.35.00	2723.05.00	-	01.00
Kota Depok	147.55.00	108.72	256.83	189.23.00	-	00.00
Kota Cimahi	250.08.00	251.30.00	435.30.00	437.44.00	-	00.00
Kota Tasikmalaya	29647.55	20883.22	51605.17	36349.80	-	0,084027778
Kota Banjar	20003.48	16299.84	34818.49	28371.86	-	0,107638889

Sumber : *Data Time Series 3 Tahun terakhir BPS, Jabar*

Menurut data statistik Provinsi Jawa Barat pada tabel 1.1 dan tabel 1.2 menngenai jumlah produksi tanaman pangan dengan beberapa komoditas unggulan yang ada di Provinsi Jawa Barat, Bekasi termasuk unggul dalam komoditas beras dan untuk komoditas lainnya didatangkan langsung dari luar Provinsi Jawa Barat, tabel diatas merupakan data statistik Provinsi Jawa Barat Tanaman Pangan, yang di publish pada tanggal 16 Juli 2021. Menurut data tersebut, Kabupaten Bekasi yang terdiri dari 23 Kecamatan merupakan salah satu kabupaten pada provinsi Jawa Barat, yang memiliki potensi pangan lokal olahan berbasis bahan pangan lokal.

Peran distribusi dalam rangkaian kegiatan rantai pasok merupakan hal penting, disribusi yang merata menjadikan bahan pokok dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat, baik di pasar induk, pasar-pasar, pasar swalayan, toko grosir, toko eceran dan warung-warung di masyarakat. Jaringan distribusi berfungsi untuk melihat saluran-atau alur distribusi yang digunakan untuk melakukan pengawasan dalam menjalankan distribusi barang atau bahan pokok, selanjutnya peran ini akan dilakukan secara berskala dalam setiap harinya, dan dibuat laporan dalam sebulan sekali untuk melihat perkembangan distribusi barang yang masuk kedalam pasar-pasar yang berada di Kabupaten Bekasi. Regulasi yang telah dibuat pemerintah pusat dalam bentuk Undang-Undang, harga pangan merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh setiap negara sebagai pemunuhan kebutuhan pangan pokok masyarakat dan pemulihan ekonomi masyarakat luas maupun daerah. Hal tersebut dijelaskan dengan beberapa penelitian dalam bentuk jurnal, salah satu jurnal penellitian yang mengangkat topik stabilisasi harga pangan, oleh Mohammad Alfie Reza tahun (2015), Pasca Sarjana IPB.

Berbagai aspek ekonomi pangan, harga merupakan salah satu aspek penting yang perlu mendapat perhatian. Pentingnya harga pangan terutama di tingkat petani-produsen (dengan tetap melindungi konsumen), dilakukan oleh pemerintah di berbagai negara melalui kebijakan intervensi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Alfie Reza (2015), Pasca Sarja IPB, yaitu Stabilisasi harga pangan merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir setiap negara di dunia. Beberapa faktor yang mempengaruhi stabilitas harga pangan adalah peningkatan populasi penduduk, perubahan iklim.

Harga komoditas pangan strategis memiliki peranan penting dalam pengendalian ketahanan pangan di Kabupaten Bekasi, berdasarkan Badan Pusat Statistik Nasional, peningkatan dan penurunan harga dikelompokkan berdasarkan golongan. komponen inflasi bergejolak, karena sifatnya yang mudah dipengaruhi oleh masa panen, gangguan alam, harga komoditas bahan pangan domestik dan internasional.

1.2 Rumusan Masalah.

Tujuan dari distribusi pangan adalah upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan serta harga pangan yang sudah dijelaskan pada peraturan perundang-udangan, selanjutnya diperinci kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015, Peraturan.bkp.go.id Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi, pada pasal 59 ayat (2) Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui : menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara efektif dan efisien, perwujudan kelancaran dan keamanan Distribusi Pangan, dan kelancaran dan keamanan Distribusi Pangan.

Faktor distribusi dinilai penting karena gangguan distribusi berpotensi menimbulkan kelangkaan pasokan yang pada akhirnya dapat memicu peningkatan harga dan ekspektasi inflasi masyarakat. Selain faktor gangguan distribusi, pengaruh faktor rantai distribusi dan peningkatan biaya distribusi juga berpengaruh terhadap pergerakan harga barang dan akan memberikan tekanan terhadap inflasi. Kemampuan dalam pengendalian terhadap fakto-faktor yang berpengaruh terhadap distribusi komoditas pangan disinyalir dapat mengurangi tekanan inflasi yang berasal dari *volatile foods*[1] (Sukartiningsih,dkk 2014).

[1] Volatile Foods adalah Komponen inflasi IHK yang mencakup beberapa bahan makanan yang harganya sangat berfluktuasi (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Berdasarkan uraian diatas maka didapatkan rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagimana analisis stabilitas harga pangan pada Pasar Tradisional di Kabupaten Bekasi?
2. Bagaimana analisa pengaruh jaringan distribusi pangan dan komoditas pangan Strategis terhadap stabilitas harga pada Pasar Tradisional di Kabupaten Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang didapatkan, maka didapatkan tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Menganalisis Stabilitas Harga pangan Pada Pasar Tradisional di Kabupaten Bekasi Periode Bulan Mei 2021 sampai dengan Mei 2022.
2. Menganalisis pengaruh jaringan distribusi pangan dan komoditas pangan strategis terhadap stabilitas harga.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1.4.1 Manfaat Bagi Mahasiswa

1. Mahasiswa dapat menyajikan hasil observasi, pengalaman dan data yang diperoleh selama penelitian kedalam Proposal Skripsi.
2. Mahasiswa dapat memperluas wawasan pengetahuan dalam bidang Agribisnis yaitu khususnya pada bidang manajemen rantai pasok.

3. Mahasiswa dapat mengembangkan dan mengaplikasikan pengalaman penelitian untuk masyarakat sekitar UPN Veteran Jawa Timur, dan masyarakat umum.

1.4.2 Manfaat Bagi Perguruan Tinggi

1. Memberikan peluang untuk membuka jalur kerjasama antar perguruan tinggi dan pemerintahan atau dinas yang terkait dan memberikan tambahan referensi khususnyaa fungsi-fungsi rantai pasok untuk pihak dalam perguruan tinggi yang memerlukan.
2. Memberikan tambahan referensi khususnya tentang distribusi pangan yang berada didepartemen atau bidang rantai pasok atau distribusi pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi

1.4.3 Manfaat Bagi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi

1. Sebagai tambahan referensi yang dapat dijadikan perbendaharaan ilmu dan pengetahuan.
2. Menambah informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pihak Dinas Ketahanan Pangan untuk megambil suatu kebijakan dalam bidang Distribusi
3. Memberikan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat program kerja selanjutnya dalam bidang distribusi pangan di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan judul “Analisis Jaringan Distribusi Pangan Komoditas Pangan Strategis sebagai upaya Mewujudkan Stabilitas Harga pada Pasar Tradisional di Kabupaten Bekasi”. Penelti membuat ruang lingkup penelitian atau batas penelitian yang akan dilakukan guna membantu dalam menentukan atau mengidentifikasikan permasalahan-permasalahan yang akan diteliti, mempermudah pembaca untuk memamahami arah atau fokus dari tujuan penelitian ini.

Ruang lingkup bisa diartikan secara lebih khusus pada materi atau hal tertentu, berikut batasan atau ruang lingkup pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah :

1. Melakukan analisis jaringan distribusi pangan pada komoditas pangan strategis. Pangan pokok yang diawasi oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi berjumlah 9 pangan pokok yang terdiri dari Beras, Cabai Merah, Bawang Merah, Bawang Putih, Jagung, Daging Ayam Ras, Daging Sapi, Telur Ayam Ras, dan Gula Pasir Lokal
2. Jumlah pasar tradisional yang terdapat di Kabupaten Bekasi berjumlah 10 Pasar Tradisional yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah, dalam penelitian ini jumlah Pasar Tradisional yang akan dibahas atau yang akan dianalisis datanya berupa jenis pangan strategis dan harga yaitu berjumlah 5 (lima) Pasar Tradisonal, berikut nama pasar yang akan dilakukan riset data oleh peneliti yaitu, Pasar Bebelan, Pasar Tambun, Pasar Induk Cibitung, Pasar Cikarang, dan Pasar Setu.

3. Pola distribusi difokuskan di Provinsi Jawa Barat, dikarenakan tempat penelitian penulis yang berada di Provinsi Jawa Barat yaitu Kabupaten Bekasi. Pola Distribusi atau saluran distribusi berdasarkan buku atau modul pembelajaran yang ditulis oleh adi Djoko dan Meirana Harsasi, 2017 mengenai Manajemen Rantai Pasok, terdapat 5 pola distribusi, pola distribusi pada penelitian menggunakan pola distribusi ke-5 dengan pola Produsen → Pengepul → Distributor → Pedagang Ecer (Retailer/Pasar) → Konsumen Akhir.